

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekstraksi adalah keputusan yang diambil untuk menangani sebuah permasalahan, ataupun pengambilan sumber daya yang dilakukan pemerintah guna menstabilkan kehidupan bernegara. Salah satu contoh ekstraksi sumber daya adalah pajak.¹ Pajak dipungut pemerintah dari rakyat guna pembangunan negara maka dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk memberikan manfaat positif kepada rakyat, akan tetapi seringkali yang terjadi adalah pajak yang diambil dari rakyat tidak memberikan manfaat, hal ini dipresentasikan dengan keluarnya kebijakan tabungan perumahan rakyat. Kebijakan ini dibuat pemerintah dengan aturan adanya pemotongan gaji 3% pada kelas pekerja untuk tujuan mengurangi backlog akan tetapi ekstraksi yang diambil oleh pemerintah menciptakan penolakan bagi buruh dan dianggap seakan tidak memberikan solusi, maka dari itu kebijakan tapera dianggap ekstraksi tanpa solusi.

Kebijakan publik hadir karena ada suatu kepentingan, pada dasarnya kebijakan publik merupakan representasi dari tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai hal ini dapat diartikan didalam masyarakat

¹ Charles Tilly. *War Making and State Making as Organized Crime*. 1985. Cambridge University Press.

timbul adanya kebutuhan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan. Peran pemerintah dalam mengayomi rakyat dengan berperan membantu memecahkan masalah salah satunya adalah menciptakan kebijakan. Setiap perumusan kebijakan publik diawali dengan perumusan masalah yang teridentifikasi, kemudian tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan masyarakat.²

Garis besarnya kebijakan sangat diharapkan dapat membantu, karena kebijakan berisikan sebuah Solusi dalam memecahkan masalah, tidak akan ada kebijakan tanpa adanya masalah. Pemasalahan masyarakat tidak melihat batasan, masalah bisa terjadi dimanapun itu artinya bisa terjadi pada lingkup kota ataupun daerah, dan dampak yang ditimbulkan dari suatu masalah yang ada tidak mengenal pandang bulu, tidak melihat dari segi ekonomi maupun masyarakat yang dari segi ekonomi berada ataupun kurang walaupun mereka merasa dirugikan sehingga dalam hal tersebut pasti dianggap sebagai permasalahan.

Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan sekunder setiap orang didalam kehidupan. Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah, masuk ke dalam 5 kota metropolitan terbesar di Indonesia. Disebut sebagai kota metropolitan karena Semarang masuk kedalam daerah dengan kompleksitas yang tinggi, dalam ruang lingkungnya sebuah masalah pasti adanya. Permasalahan terkait hunian yang layak masih menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

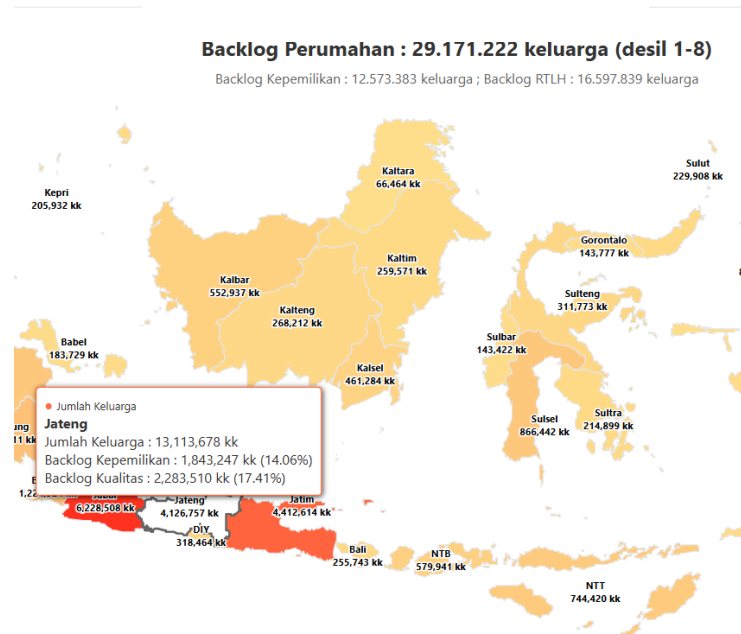
² Marryam Salampessy,dkk. *Kebijakan Publik*. CV Gita Lentera, 2023. Cet. 1, hlm 2

Memiliki hunian yang layak ini menyangkut pada kesejahteraan rakyat Indonesia yang tertuang pada Pasal 28 H Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”³ hal ini juga didukung dengan Pasal 40 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”⁴ Berbagai permasalahan yang muncul jika membicarakan mengenai hunian yang layak seperti halnya harga rumah yang tinggi menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak., sehingga hal ini muncul sebuah kondisi yang bernama *Backlog*.

³ Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1

⁴ Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40

Gambar 1. 1 Data Backlog Perumahan



Sumber: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. 2025

Data terbaru *backlog* pada tahun 2025 menurut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sebanyak 29.171.222 keluarga, dengan Backlog Kepemilikan 12.573.383 keluarga dan Backlog RTLH 16.597.839 keluarga. Dan menurut data angka backlog di Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan 13.113.678 keluarga mencapai angka Backlog Kepemilikan 1.843.247 keluarga dan Backlog RTLH 2.283.510 keluarga, Jawa Tengah menjadi provinsi zona merah dalam kasus backlog.⁵ Terkait hal ini dalam partisipasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mengatasi permasalahan yang ada,

⁵ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. (2025). Dashboard Perumahan. Diakses pada Maret 2, 2026 dari laman berita <https://my.pkp.go.id/dashboardhome?thangbsps=2025#form2>

pemerintah mengeluarkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ⁶ dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. ⁷ Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah, pemerintah membuat Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang merupakan cikal bakal dari Bapertarum-PNS. Dalam keberjalanannya Tapera diharapkan dapat memberikan hunian yang layak kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam keberjalanannya Tapera mengalami penolakan yang masif dari kalangan buruh. Bagi buruh Tapera terlalu memberatkan salah satunya dalam pemotongan gaji 3% dengan pembagian 2,5% pekerja dan 0,5% pemberi kerja. Dalam konteks ini membuat adanya reaksi kolektif yang terjadi di kalangan buruh Kota Semarang, yang ditunjukkan dalam bentuk aksi penolakan.

Pada tanggal 6 Juni 2024, ratusan buruh di Kota Semarang menyambangi kantor gubernur untuk melakukan aksi, aksi yang dilakukan buruh merupakan representasi dari penolakan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah Aulia Hakim pada suaramerdeka.com (6/6/2024) menjelaskan “Program Tapera yang digulirkan melalui PP Nomor 21 Tahun 2024, menjadi bukti bahwa

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

pemerintah melepas tanggung jawab dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini kok justru membebani biaya hidup buruh dengan daya beli buruh sudah turun 30 persen dan upah minimum sangat rendah akibat Undang- Undang Cipta Kerja. Dari program Tapera ini justru malah semakin memukul daya beli buruh".⁸

Tidak hanya buruh di Kota Semarang akan tetapi gerakan buruh atau serikat buruh di seluruh Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Sumatera Utara pun melakukan penolakan dalam bentuk aksi terhadap kebijakan ini. Buruh di Yogyakarta yang tergabung kedalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melakukan penolakan buruh dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024 di depan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁹Sementara itu pada tanggal 6 Juni 2024 pula ribuan buruh yang tergabung kedalam Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh berkumpul di depan Istana Negara. ¹⁰ Pada tanggal 27 Juni

⁸ Modesta Fiska.(2024, Juni 06). Ratusan Buruh di Semarang Demo Tolak Tapera, Cuma Jadi Beban dan Memberatkan.Diakses pada September 5, 2024 dari laman berita : <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412851082/ratusan-buruh-di-semarang-demo-tolak-tapera-cuma-jadi-beban-dan-memberatkan>

⁹ Jauh Hari Wawan S. (2024, Juni 06) Buruh Gelar Aksi Tolak Tapera di Disnakertrans DIY. Diakses pada September 5, 2024 dari laman berita : <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7377103/buruh-gelar-aksi-tolak-tapera-di-disnakertrans-diy#:~:text=Puluhan%20buruh%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20%28DIY%29%20menggelar,buruh%20itu%20bergantian%20berorasi%20di%20depan%20kantor%20Disnakertrans.>

¹⁰ Haryanti Puspa Sari & Aprillia Ika. (2024, Juni 06) Kamis, Serikat Buruh Akan Gelar Demo Tolak

2024 telah terjadi pula aksi penolakan di Medan, Sumatera Utara. Aksi penolakan ini di wakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja Sumatera Utara, aksi ini menyambang kantor DPRD Sumatera Utara yang mana aksi ini bertajuk Gerakan Serikat Pekerja Bersama Apindo Sumut Tolak Tapera (Gaspol TAPERA), dengan direpresentasikan pagelaran seni barongsai.¹¹ Dan terdapat aksi penolakan buruh pula di Subang, yang dilakukan pada 11 Juni 2024 di depan DPRD Subang yang di wakili oleh Aliansi Buruh Subang¹²

Dalam pelaksanaannya, kebijakan Tapera justru memicu munculnya penolakan dari kalangan buruh di Kota Semarang. Penolakan tersebut disampaikan secara kolektif melalui berbagai saluran, mulai dari aksi unjuk rasa, sikap resmi organisasi atau serikat buruh, hingga upaya penyampaian aspirasi kepada pihak pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan dianggap relevan oleh kelompok yang terdampak secara langsung. Apabila kebijakan yang dikeluarkan bersifat memberatkan, kurang transparan, atau tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, maka penolakan

Tapera di Depan Istana. Diakses pada September 5, 2024 dari laman berita : <https://money.kompas.com/read/2024/06/04/133000326/kamis-serikat-buruh-akan-gelar-demo-tolak-tapera-di-depan-istana?page=all>

¹¹ Ayo Medan.com. (2024, Juni 27) Dinilai Membodohi Buruh, Serikat Buruh Sumut Tolak 'Tapera' Diakses pada September 5, 2024 dari laman berita : <https://www.ayomedan.com/2024/06/dinilai-membodohi-buruh-serikat-buruh.html>

¹² Tim iNews.id. (2024, Juni 11) Tolak Tapera, Ratusan Buruh di Subang Gelar Unjuk Rasa. Diakses pada September 5, 2024 dari laman berita : <https://subang.inews.id/read/454604/tolak-tapera-ratusan-buruh-di-subang-gelar-unjuk-rasa>

menjadi bentuk respons yang wajar.

Penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera juga representasi adanya hubungan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Buruh tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai pihak yang menerima keputusan secara sepihak, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam menyuarakan kepentingan dan memperjuangkan haknya. Dalam kerangka kebijakan publik, respons tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan masyarakat sekaligus upaya pengawasan terhadap kebijakan negara.

Berdasarkan berbagai kejadian yang dilakukan buruh dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan pemotongan gaji 3% pada program Tapera. Maka dari itu penulis berminat untuk meneliti topik penolakan buruh Kota Semarang pada program Tapera dengan demikian hasil dari penelitian dapat memberikan pandangan kepada pemerintah untuk dapat tidak memandang sebelah mata aksi yang dilakukan khususnya oleh kaum bawah yaitu buruh serta dapat menjadi kontrol kebijakan publik yang ada agar tetap dalam jalur yang benar sesuai dengan kondisi asli yang diharapkan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa alasan buruh di Kota Semarang melakukan aksi penolakan kebijakan pemotongan gaji 3% pada program Tabungan Perumahan Rakyat?
2. Bagaimana cara buruh Kota Semarang melakukan penolakan terhadap

kebijakan pemotongan gaji 3% pada program Tabungan Perumahan Rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji alasan yang melatarbelakangi buruh Kota Semarang melakukan penolakan terhadap kebijakan pemotongan gaji 3% pada program Tabungan Perumahan Rakyat
2. Menganalisis bentuk dan strategi yang digunakan buruh dalam melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan pemotongan gaji 3% pada program Tabungan Perumahan Rakyat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah guna mengembangkan teori-teori yang hadir dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat dan Kesejahteraan Buruh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi:

1. Masyarakat

Aktivitas dan feedback masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan pemotongan gaji pada program Tabungan Perumahan Rakyat menuntut adanya kesadaran dari pemerintah akan suara yang diberikan masyarakat

harapannya dapat lebih melihat akan kesejahteraan buruh. Sehingga dengan ini masyarakat agar tetap mengawal isu yang berkaitan dengan kebijakan ini ataupun kesejahteraan buruh, karena sejatinya hidup di negara demokrasi, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dasar 1945 dan dalam hal ini kedudukan pemerintah segai aktor elit dengan slogannya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat memiliki kewajiban untuk mengayomi rakyat, mendengarkan keterbutuhan rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan demikian masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki peran besar untuk saling membantu apabila terdapat masyarakat lain yang merasa tertindas oleh kebijakan yang dibuat pemerintah dengan memperjuangkan hak kesejahteraan sosial

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai aktor elit yang memilki kedudukan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, akan tetapi pada dasarnya didalam sebuah kebijakan terdapat tiga aktor yang paling berperan yaitu pemerintah, organisasi swasta dan rakyat. Jika dalam suatu kebijakan terdapat adanya penolakan dari masyarakat maka peran pemerintah disini diperlukan kembali, yang mana suara masyarakat digunakan sebagai refleksi dan evaluasi pada langkah pemerintah kedepan dalam sebuah pembuatan kebijakan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya dalam menghindari

kesamaan terhadap penelitian lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dalam hal ini merangkumkan penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini, adapun mencamtukan beberapa hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
Analisis Opini Publik Gerakan Penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNMUL	Gita Apriani, Hairunnisa, Nurliah		2024		1. Isu yang diangkat menimbulkan pro dan kontra diantara pihak dan media mengkemaskan dengan membentuk sebuah opini publik. 1. Sekumpulan orang yang melihat postingan BEM KM UNMUL merespon postingan dengan mengikuti gerakan penolakan. 2. Gerakan penolakan	Jurnal	Penolakan BEM KM UNIMUL (Mahasiswa) terhadap RUU KUHP, dan lokus penelitian ini di Kalimantan Timur
					ini merupakan representasi mahasiswa		

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
<p>“CIVIL SOCIETY dan Partisipasi: Studi pada Penolakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Terhadap Rancangan Undang-Undang</p>	<p>Arin H. Rizqiyah</p>	<p>Teori <i>Civil Society</i> dan Teori Partisipasi</p>	<p>2022</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>1. Dalam prosesnya pengesahan RUU PKS menimbulkan pro dan kontra dari kelompok satu ke kelompok lainnya civil society. Dengan ini kelompok civil society ikut</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Topik penelitian lebih dalam penolakan KAMMI terhadap RUU PKS, dan subjek yang digunakan yaitu Organisasi KAMMI</p>

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
<p>Penghapusan Kekerasan Seksual</p>					<p>berpartisipasi dalam sebuah pengambilan keputusan kebijakan public karena memiliki paradigma pemikiran mengenai RUU PKS yang berbeda. 2. Bentuk penolakan yang dilakukan KAMMI terhadap RUU PKS adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa RUU PKS ini tidak memecahkan masalah yang ada akan tetapi menimbulkan</p>		

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
<p>Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum</p>	<p>Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi</p>		<p>2013</p>		<p>UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR menjadi kebijakan yang menimbulkan penolakan besar dari masyarakat karena dianggap UU Cipta kerja memiliki pasal pasal yang tidak relevan dengan fakta yang ada khususnya bagi buruh sehingga menimbulkan</p>	<p>Jurnal</p>	<p>Penolakan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Penolakan dilakukan oleh Buruh dan Mahasiswa</p>

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
Analisis Dampak Penolakan Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Alya Chiarta Kumria Sukma Prakoro dan Ridwan	1 Teori elit menurut Vilfredo Pareto 2. Teori kebijakan menurut Heinz and Prewit	2023	Metode Kualitatif	Karena hal ini dinilai menimbulkan polarisasi kepentingan internal DPRD DKI Jakarta, dampak dari penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menimbulkan hubungan fraksi PKS dengan pemerintah DKI Jakarta retak. Dan	Skripsi	Topik penelitian merupakan penolakan terhadap kebijakan reklamasi. Subjek penelitian masyarakat yang terdampak pada proyek reklamasi yang kelompokan menjadi Aliansi Korban Reklamasi

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial	Viona Margaretha	Teori Pembangunan	2024	Metode Kualitatif	Menuurt penelitian ini UU Tapera memperlihatkan berbagai kelemahan yang bertentangan dengan berbagai prinsip yaitu keadilan, hukum dan kemanfaata. Dan UU Tapera dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat khususnya	Jurnal	Topik penelitian ini yaitu menilai dampak UU Tapera yang menimbulkan kontroversi bagi masyarakat.
					adanya kepentingan antara grass roots dengan para kapitalis yang menimbulkan konflik.		(AKR), Lokasi penelitian di Teluk Jakarta (Provinsi DKI Jakarta)

Judul	Nama Penulis	Teori	Tahun Terbit	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian	Gap Penelitian
Mahasiswa dan Intellektual Sebagai Kekuatan Politik: Studi Atas Gerakan Mahasiswa Terhadap Penolakan Kebijakan UU Ciptaker	Rahmaudina Al Khanzah, Retno Remawati, Ricky Aji Pradana, sMoh. Ishomuddin Ihsan		2024	Metode Kualitatif	rumah dengan adil dan merata Peran mahasiswa sebagai agent of change karena dianggap mahasiswa sebagai intelektual yang memiliki tupoksi dalam mengawal suara rakyat. Hal ini dianggap mahasiswa aware dengan isu politik, akan tetapi banyak unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa malah merusak fasilitas. umum sehingga hal ini diperlukan adanya solusi bagaimana caranya agar aspirasi disampaikan dengan damai tanpa merusak fasilitas umum	Jurnal Penelitian	Subyek penelitian mahasiswa. Topik penelitian penolakan mahasiswa terhadap UU Cipta Kerja.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dari penelitian ini dengan berbagai penelitian terdahulu yang ada seperti yang tertera padatable di atas. Bahwa kesamaan dari antar penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama mengangkat mengenai penolakan kebijakan atau gerakan penolakan yang dilakukan masyarakat maupun dilakukan mahasiswa. Akan tetapi di balik itu penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ada juga memiliki perbedaan yakni, penelitian terdahulu tidak membahas mengenai Kebijakan Tapera, dan penelitian ini membahas mengenai penolakan buruh terhadap Kebijakan Tapera. Sehingga dirasa penelitian ini sangatlah menarik dan penting untuk di bahas karena memiliki keterbaruan karena belum di bahas di penelitian- penelitian terdahulu. Dan diharapkan penelitian ini menjadi keterwakilan dari suara buruh terhadap kebijakan yang dirasa mencekik rakyat khususnya Kebijakan Tapera.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Protes Sosial

Protes sosial merupakan bentuk partisipasi non-konvensional yang artinya masyarakat melibatkan diri kedalam lingkungan atau kehidupan politik dan sosial bentuk keterlibatan masyarakat dalam partisipasi non konvensional ini biasanya dituangkan dalam bentuk protes sosial, demonstrasi, aksi, pengajuan petisi, hal ini dilakukan untuk mendorong adanya suatu perubahan. Hal ini selaras dengan napa yang dijelaskan oleh Gabriel Almond yang memandang bahwa protes atau aksi kolektif adalah perwujudan saluran partisipasi nonkonvensional sporadis, yang dilakukan oleh kelompok kepentingan anomik. Sebagai penganut aliran struktural

fungsional, Gabriel Almond menganjurkan bahwa sistem politik yang demokratis bisa dibangun berdasarkan interaksi secara seimbang di antara struktur-struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, dan partisipasi secara konvensional melalui pemilihan umum, partai dan parlemen. Apabila struktur-struktur dan fungsi-fungsi ini berinteraksi secara “seimbang” maka tidak bakal muncul protes sosial jalanan yang sebenarnya akan merusak sistem yang sudah terlembaga.¹³ Seringkali masyarakat memilih jalan berpartisipasi nonkonvensional dianggap karena dalam berpartisipasi konvensional masyarakat mengalami penurunan minat dan merasa jenuh. Sehingga dalam hal ini banyak masyarakat public bergeser dari partisipasi konvensional ke partisipasi nonkonvensional yang dituangkan dalam bentuk protes sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat dan meluap menjadi kontroversial. Kristeva berpendapat bahwa Protes sosial adalah perlawanan kolektif terhadap pemerintah yang berjangka pendek dan spontan untuk mencapai sasaran reformasi, yang bisa menghasilkan perubahan kebijakan pemerintah, runtuhnya pemerintahan dan perubahan struktur politik.¹⁴

Arti protes sosial memiliki makna yang berbeda beda tergantung dari tempat dan observasi dalam mencari data terhadap sebuah fakta. Selain itu makna protes sosial memiliki arti yang sama dengan yang lainnya seperti perilaku kolektif, demonstrasi, gerakan sosial, dan lain-lain. Ahli gerakan

¹³ Nur Sayyid Santoso Kristeva. *Sekolah Gersos : Wacana Gerakan Sosial Untuk Membangkitkan Semangat Perlawanan, Membela Rakyat Yang Terhisap & Tertindas, Untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil*. 2016. hlm 116-117

¹⁴ Ibid,118-119

sosial terkemuka, Charles Tilly mengartikan makna protes sosial dengan istilah aksi kolektif, pemberontak ataupun pembangkang dibandingkan dengan diksi protes sosial, hal ini bermaksud pencerminan posisi para elit politik sebagai pemangku sebuah kekuasaan. Aksi kolektif dan protes politik memiliki persamaan yakni dalam perilaku sama sama melawan sebuah pemegang kekuasaan dalam arti lain elit politik yang menduduki posisi tertentu di dalam politik¹⁵. Tidak hanya itu dalam bukunya *War Making and State Making as Organized Crime*, menjelaskan bahwa negara hadir karena ada sebuah perang dan negara terus melakukan perang, dalam logika protes sosial dimana negara yang menyiapkan diri ketika akan melakukan perang biasanya negara terus membutuhkan kekuatan yang didapat dari sumber daya masyarakat seperti extraction salah satunya pajak, dengan adanya hal tersebut masyarakat salah satunya buruh merakasan beban dari pajak tersebut dan pada akhirnya memunculkan resistensi.¹⁶ Extraction menyebabkan resistensi karena menurut Charles Tilly, ketika negara mengambil sumber daya kepada masyarakat biasanya menggunakan sistem paksaan serta sering terjadi juga manfaat dari pengambilan sumberdaya tidak sebanding dengan apa yang diberikan masyarakat atau dengan kata lain manfaat yang diterima masyarakat tidak dirasakan dengan adil, akhirnya masyarakat menganggap kenapa masyarakat harus yang menanggung lebih banyak kebijakan yang dihasilkan oleh negara.

¹⁵ Guilda West dan Rhoda Lois Blumberg. *Women and Social Protest*. New York. Oxford University Press, 1990. Hlm. 5-6

¹⁶ Charles Tilly. *War Making and State Making as Organized Crime*. 1985. Cambridge University Press.

Sementara itu arti aksi kolektif menurut Sydney Tarrow adalah sebuah tindakan melawan dari rakyat dengan berpedoman pada solidaritas dan tujuan bersama, dengan berinteraksi kepada elite politik, pemegang kekuasaan ataupun musuh mereka.¹⁷ Hal ini juga di ungkapkan oleh Le Bon yang menjelaskan bahwa protes sosial sebagai tingkah laku yang dilakukan sekelompok orang dengan lebih emosional, dan secara umum tindakan mereka dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan tidak dengan cara yang wajar sebagaimana orang berorganisasi.¹⁸ Dengan demikian aksi kolektif merupakan suatu kelompok kepetingan, pembangkang, revolusi ataupun gerakan protes sosial.

1.6.2 Teori *Deprivasi Relative* “Why Men Rebel”

Social Movement atau Gerakan Sosial adalah suatu tindakan berupa penentangan kolektif oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama yang mana berupa protes dalam berinteraksi terhadap pihak elit ataupun pihak lawan yang memiliki kewenangan lebih dalam mencapai tujuan mereka. Pada dasarnya rakyat mengerahkan massa bukan tanpa sebab akan tetapi protes sekumpulan buruh karena menentang tindakan pemerintah yang dirasa merugikan, dalam hal ini sekumpulan buruh tentu memiliki solidaritas yang tinggi dan memiliki emosi yang kental dalam menyuarakan suaranya untuk memperoleh tujuan yang sama. Teori Gerakan Sosial Klasik dijelaskan oleh

¹⁷ Nur Sayyid Santoso Kristeva. *Sekolah Gersos : Wacana Gerakan Sosial Untuk Membangkitkan Semangat Perlawanan, Membela Rakyat Yang Terhisap & Tertindas, Untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil*. 2016. hlm 108-109

¹⁸ AF Sigit Rochadi. *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. 2020.

Ted Robert Gurr yaitu bahwa Kekerasan suatu kelompok atau seseorang terjadi karena adanya kemarahan atau frustrasi yang berkepanjangan, kemarahan terjadi karena adanya *Deprivasi Relative* yaitu adanya kesenjangan atau ketidakadilan karena adanya perbedaan persepsi antara hak yang mereka dapatkan dengan apa yang sebenarnya mereka pikir bisa mereka dapatkan lebih dari itu, *Deprivasi Relative* terjadi karena dua faktor yaitu pertama karena adanya *Value Expectations* yaitu hak yang diharapkan untuk didapat, dan yang kedua adanya *Value Capabilities* yaitu apa yang orang peroleh dalam kondisi nyata. Maka dari itu juga *Value Capabilities* lebih kecil dari *Value Expectations* dapat menciptakan *Deprivasi Relative*. Dan *Deprivasi Relative* dapat menimbulkan Frustrasi Agresif dimana ketika hak hak masyarakat terabaikan maka biasanya masyarakat akan mengimplementasikannya dengan perilaku atau tindakan kolektif agresif. Kolektif Agresif dapat menciptakan adanya kekerasan, kekerasan terbagi menjadi beberapa bentuk seperti :

1. *Turmoil* : Kekerasan politik yang relatif spontan dan tidak terorganisir dengan partisipasi rakyat yang substansial, seperti kerusuhan, bentrokan politik demonstrasi, pawai massa yang berujung anarki.
2. *Conspiracy* : Kekerasan politik yang sangat terorganisasi dengan partisipasi terbatas atau kecil, seperti teror politik, perang gerilya skala kecil, kudeta
3. *Internal War* : Kekerasan politik yang sangat terorganisir dengan

menyebarkan partisipasi atau skala besar, seperti perang saudara dan revolusi.

Menurut Gurr terdapat 5 hierarki dalam kekerasan , sebagai berikut:

1. Discontent (Ketidakpuasan)

Situasi yang terjadi dari rasa ketidakpuasan masyarakat yang menumpuk. Mereka beranggapan bahwa apa yang masyarakat berikan selama ini tidak setara atau sepadan dengan apa yang negara berikan. Diluar sana banyak orang yang berjuang untuk hidup dengan gaji yang rendah akan tetapi ada pula orang yang hidup dengan kekayaan, akan tetapi kebijakan yang dibuat pemerintah justru hanya menguntungkan satu pihak saja rakyat kecil makin tercekik dengan harga yang terus naik akan tetapi para kaum borjouis dan para pejabat merasa diuntungkan. Pada tahap ini ketidakpuasan masyarakat belum terlihat di permukaan hanya dalam pembicaraan dalam meja kecil. Percakapan daring dan media serta perasaan yang di rasakan bersama menciptakan kesadaran bersama dan mulai menyadari bahwa masalah itu adalah bersifat sistemik bukanlah nasib buruk segelintir orang.

Pada dasarnya akumulasi ketidakpuasan bersifat kumulatif, karena frustasi yang tumbuh tidak akan pernah hilang begitu saja jika tidak ada tindakan dari pihak yang dituju berusaha untuk meredamnya, yang terjadi adalah frustasi akan semakin menumpuk, dan setiap kelompok atau individu memiliki ambang batas toleransi dalam menanggapi argumen pihak lain yang pada akhirnya tidak memenuhi

ekspektasi individu atau kelompok tersebut, karena akan mengulangi terus menerus ketidakpuasan kolektif individu atau kelompok tersebut. Hal ini tentu memiliki waktu tertentu dalam ketidakpuasan, ketika pihak lain menganggap kebijakan tapera adalah hal kecil akan tetapi buruh menganggap bahwa tapera adalah sudah batas maksimum buruh dalam memendam ketidakadilan yang diberikan pemerintah kepada buruh, maka akan membuat persistensi yang dapat menimbulkan kekerasan nantinya, biasanya hal ini ditandai dengan narasi dari buruh “kita selalu dirugikan”

Dalam ketidakpuasan ini ada berbagai macam pemicu yang mengakibatkan ledakan ke tahap yang lebih tinggi seperti karena ada kebijakan baru yang menimbulkan kerugian bagi rakyat, pernyataan pejabat yang dianggap menyinggung perasaan rakyat, dan sebagainya.

2. *Expression of Claims* (Penyampaian Tuntutan)

Tahap ini masih kedalam tingkatan yang paling awal dan rendah, karena pada tahap ini masih dalam perdamaian dimana pihak yang merasa dirugikan yaitu buruh masih mengekspresikan atau mengkomunikasikan tuntutan mereka dengan pihak yang memiliki kewenangan seperti elit politik dengan damai tanpa adanya kekerasan. Dan pada tahap ini belum termasuk ke dalam mobilisasi, karena sebagian pihak beranggapan kanal legal masih dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Ketika kelompok mulai masuk arena konflik politik, hal tersebut

menjadi salah satu indikator *expression of claims* yang masih bisa diterima oleh sistem politik. Selain itu *expression of claims* berfungsi sebagai kecenderungan politik terhadap pemerintah, apabila pemerintah mampu memberikan tanggapan dengan penyesuaian dan memberikan ruang efektif. Tetapi apabila pemerintah memberikan penolakan maka *expression of claims* dapat menjadi *civil disobedience*, *political protest* bahkan *violent rebellion*.

Expression of claims bukan hanya tuntutan yang sifatnya mendasar, ketika terdapat identitas kolektif yang menyatakan suatu tuntutan dengan memperkuat secara kelompok dan secara struktural. Dengan demikian *expression of claims* berfungsi sebagai konsolidasi kelompok internal, dengan tahapan yang mempermudah mobilisasi. Banyak konflik berhenti di tahap ini.

3. Mobilisasi

Ketika tahap sebelumnya akumulasi ketidakpuasan mulai meluas, masyarakat melakukan pergerakan secara kolektif sehingga dalam hal ini menjadi tindakan nyata, pada tahap ini serikat mulai membentuk pimpinan dan aktivis aktivis yang dapat membantu dalam mengubah ketidakpuasan menjadi gerakan yang terarah, seperti : aksi, protes, pembentukan partai politik alternatif. Pada tahap ini gurr menekankan bahwa ketidakpuasan dapat menjadi kekuatan sosial, yang semula hanya sebuah keluhan segelintir orang, dan dapat menjadi gerakan politik terorganisir dengan tujuan menantang legalitas pemerintah,

tanpa adanya mobilisasi kolektif ketidakpuasan yang dirasakan atau bangun oleh buruh akan berhenti menjadi reistensi laten semata.

Terdapat 4 jenis mobilisasi kolektif dalam buku Why Men Rebel, yaitu:

a. Mobilisasi spontan (Spontaneous Mobilization)

Salah satu bentuk mobilisasi kolektif yang terjadi karena reaksi langsung dan cepat terhadap tindakan pemerintah yang bersifat merugikan serta tidak adil oleh masyarakat. Dalam mobilisasi spontan ini, aksi kolektif tidak melewati proses perencanaan dan organisir yang matang, melainkan perkembangannya spontan sebagai luapan emosi kolektif

Minimnya keterlibatan organisasi formal yang terdapat serikat, partai politik, atau hierarki kepemimpinan yang jelas merupakan indikator mobilisasi spontan. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa ketidakadilan adalah emosi dari partisipasi massa. Oleh karena itu, pola aksi seperti ini tidak terkoordinasi dengan baik, sulit untuk dikendalikan, dan tidak berkelanjutan. Mobilisasi spontan bersifat situasional dan reda usai penyebab awal hilang.

Demonstrasi mendadak sampai terjadi kerusuhan, ketika tidak terapat ruang efektif untuk penyampaian aspirasi tuntutan masyarakat merupakan bentuk mobilisasi spontan yang umum. Dengan demikian, aksi tidak memiliki tuntutan yang dirumuskan

secara sistematis, tetapi sebagai ekspresi langsung dari akumulasi ketidakpuasan sosial.

b. Mobilisasi Terorganisir (*Organized Mobilization*)

Mobilisasi ini terjadi karena salah satunya dari organisasi formal seperti serikat pekerja atau buruh, gerakan sosial lainnya ataupun partai politik. Mobilisasi ini biasanya muncul karena adanya konsolidasi kepentingan yang dibangun serta adanya gerakan massa yang sistematis, karena organisasi atau gerakan menjadi aktor penting dalam menyampaikan keluhan kolektif yang dibawakan.

Ciri dalam mobilisasi ini adalah biasanya tuntutan yang dibawakan tidak lagi secara emosional akan tetapi sudah dirumuskan menggunakan strategi yang rasional. Maka dari itu mobilisasi ini biasanya menjadi ciri bahwa aksi akan dilakukan secara berulang yang mengakibatkan tekanan yang diberikan dapat lebih efektif dalam mengambil keputusan kedepannya. Bentuk dalam mobilisasi ini biasanya adalah seperti demonstrasi yang dilakukan secara nasional, mogok kerja dan petisi. Sehingga dapat menarik dukungan dari pihak luar lebih lebar lagi.

c. Mobilisasi Reformis (*Non-Violent Political Mobilization*)

Bentuk mobilisasi kolektif yang mengacu pada perubahan kebijakan publik tanpa menjatuhkan atau menggantikan rezim

yang berkuasa. Dalam hal ini, masyarakat mengakui legitimasi otoritas dari negara, akan tetapi menolak kebijakan yang sifatnya tidak adil, merugikan, dan tidak sesuai dengan kepentingan kelompok.

Fokus pada tuntutan kebijakan yang terukur dan spesifik adalah ciri utama mobilisasi reformis. Ketidakpuasan kolektif diarahkan secara rasional melalui dialog sosial dan saluran politik yang dianggap sah. Pada mobilisasi reformis, aksi kolektif tidak bertumpu pada penggunaan kekerasan, akan tetapi upaya sebagai dukungan untuk memengaruhi pengambilan keputusan negara dan memperkuat legitimasi tuntutan.

d. Mobilisasi Revolusioner

Mobilisasi revolusioner atau radikal ini menjadi bentuk mobilisasi yang paling ekstrem dicirikan dengan individu atau kelompok melakukan penolakan total kepada legitimasi politik yang ada. Dalam mobilisasi ini kekerasan yang dilakukan tidak menjadi hal yang tabu untuk dilakukan akan tetapi suatu yang sah dan harus untuk dilakukan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebagian besar mobilisasi revolusioner ini bersifat frontal yang akan berimplikasi pada konflik yang dilakukan secara terbuka misalnya dengan kelompok yang menentang kepada negara.

Mobilisasi ini biasanya terjadi karena hubungan antara

masyarakat dan negara sudah dalam ambang paling akhir, mobilisasi ini terjadi ketika relative deprivation sangat intens dan lebih menjalar kemana mana yang menyebabkan ketidakpuasan yang dirasakan individu atau kelompok tidak dapat ditoleransi lagi.

4. Ledakan Kekerasan (*Explosion of Violence*)

Pada tahap ini ketika pemerintah seakan menutup rapat rapat telinganya maka akan mencapai titik jenuh rakyat yang mengakibatkan tindakan ekstrem, karena pada dasarnya setiap amarah memiliki ambang batas kesabarannya masing masing. Dan pada tahap Gurr menekankan bahwa Kekerasan bukanlah pilihan pertama rakyat akan tetapi jalan terakhir yang mana ketika semua jalan ditutup dan hanya tersisa satu satunya jalan adalah kekerasan. Ledakan kekerasan terdapat beberapa bentuk seperti : Kudeta, Perang Saudara, Revolusi

Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi tanda terjadinya ledakan kekerasan:

A. Partisipasi populer

Dalam hal ini ledakan biasanya terjadi karena adanya keterlibatan publik dan organisasi formal seperti serikat pekerja, dimana mobilisasi bisa terbentuk karena adanya penggabungan emosi antara berbagai pihak dan kelompok.

B. Kepemimpinan Minimal

Memiliki kepemimpinan yang sementara yaitu dalam kejadian tersebut saja tidak paten memiliki komando yang hierarkis

C. *Trigger Event*

Ledakan Kekerasan terjadi karena adanya pemicu awal atau isu yang akan dibahas nantinya, biasanya seperti kebijakan yang kontroversial dan harus di lakukan penolakan, ataupun kejadian diskriminasi yang dapat memicu ledakan kekerasan.

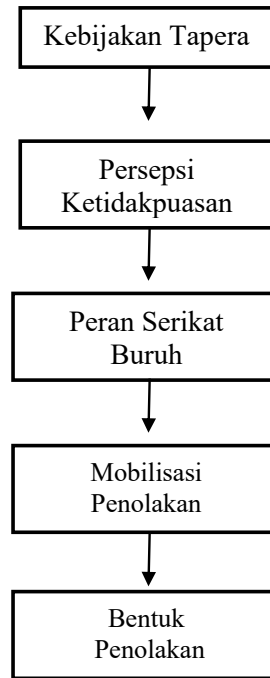
Maka dari itu ketidakadilan yang di biarkan berkembang tanpa adanya jawaban yang pasti maka kekerasan akan lahir, dan ketika masyarakat tidak ada tempat untuk menyampaikan hak berbicara maka masyarakat akan membuat tempat itu sendiri.

5. *Internal War/ Rebel*

Puncak tertinggi dalam sebuah pemberontakan yang mana bentuk eskalasi paling ekstrem dari sebuah konflik, muncul pada saat ketidakpuasan yang sebelumnya hanya bersifat psikologis berubah menjadi kekerasan yang teorganisir dan berusaha dalam mengganti rezim dengan tujuan utama yaitu revolusi. Pada tahap ini sangat puncak biasanya ditandai dan identik dengan kekerasan jangka panjang, bersenjata dan teorganisir. Karena pada tahap ini kekerasan dalam internal war pasti akan memiliki sifat

mematikan dan selalu ada korban jiwa¹⁹

1.7 Landasan Berpikir



1.8 Definisi Konsep

Gerakan Sosial adalah tindakan yang berdasarkan aksi dari sekelompok individu atau organisasi yang terjadi sebab reaksi inkonsistensi terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Pada dasarnya gerakan sosial dilakukan untuk melakukan reorganisasi yang diorganisir untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dengan tujuan mencapai keinginan yang menjadi cita cita dari sekelompok individu atau organisasi. Terjadinya perluasan Gerakan sosial ini karena ketidakpuasan sekelompok individu atau organisasi terhadap situasi dan

¹⁹ Gurr Ted Robert. *Why Men Rebel*. (Paradigm Publishers 2011)

kondisi yang ada yang menimbulkan kesenjangan di sektor kehidupan. Adanya tujuan bersama yang menjadi alasan kuat untuk terjadinya pertentangan dan identitas Bersama yang menjadi nilai dasar dalam sekelompok individu sehingga dapat terciptanya perubahan. Gerakan sosial dapat ditimbulkan melalui media sosial yang diimplementasikan melalui media propaganda, di dalam penggunaan media sosial ini jejaring akan lebih kuat untuk terjadi interaksi sosial antar individu ditengah Gerakan sosial.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Melalui prosedur dan pelaksanaan pada setiap tahap penelitian yang umumnya digunakan pada penelitian kualitatif. Menurut Creswell, menyatakan bahwa pendekatan kualitatif yang berfungsi menciptakan atau secara induktif membentuk teori konstruktivisme sosial, Terdapat postpositivisme yang berisi rencana aksi perubahan yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang yang menjadi peserta, kehidupan seperti tempat tinggal dan pekerjaan²⁰. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan detail, teknik pengumpulan data melibatkan analisis data yang bersifat induktif dan penggabungan data.

Penelitian dengan metode studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang meneliti kehidupan nyata, bermacam sistem terbatas

²⁰ John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

(berbagai kasus) atau sistem terbatas kontemporer (kasus), melalui pengkolektifan data secara komprehensif dan detail dengan melibatkan beragam sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen laporan, kemediaan serta menyajikan deskripsi kasus dan tema yang relevan.

Kemudian menurut Yin, penelitian yang berbentuk studi kasus merupakan upaya yang memerlukan keterampilan dan kompetensi dari peneliti.²¹ Hal ini dapat dilakukan korelasi antara teori dan praktik melalui penyajian bermacam kajian kasus dan pentingnya sejarah pada praktik. Apabila proses ini mendapat perhatian yang dibutuhkan, maka hasilnya adalah produksi studi kasus dengan kualitas tinggi. Studi kasus dapat berarti sebagai penyelidikan empiris yang mengkaji fenomena kontemporer dari sebuah kasus secara detail dalam kehidupan nyata.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berfokus pada serikat buruh yang berkaitan langsung melakukan penolakan program Tapera baik yang melakukan aksi turun ke jalan ataupun tidak, seperti :

1. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah;
2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah;
3. Federasi Serikat Pekerja Independen;
4. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara.

²¹ Robert K, Yin. Studi Kasus: Desain & Metode. Terjemahan Dr. Iswadi, M.Pd.; Prof. Dr. Hj Neti Karnati, M.Pd; & Ahmad Andry B, M.Pd (Penerbit Adab,2023)

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yakni utamanya adalah buruh di Kota Semarang yang tergabung kedalam serikat pekerja salah satunya yang melakukan aksi penolakan kebijakan Tapera serta tanggapan kepada pihak yang tidak melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Tapera, yaitu:

1. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah;
 - a. Sumartono yang merupakan anggota aksi penolakan Tapera 2024;
 - b. Panji yang merupakan anggota aksi penolakan Tapera 2024;
2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah;
 - a. Luqman Hakim yang merupakan Ketua aksi penolakan Tapera 2024;
3. Federasi Serikat Pekerja Independen;
 - a. Waluyo yang merupakan Ketua FSPI dan pihak yang tidak melakukan aksi penolakan kebijakan Tapera;
4. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara;
 - a. Heru Budi Utoyo yang merupakan Sekretaris Jenderal KSPN dan pihak yang tidak melakukan aksi penolakan kebijakan Tapera.

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif studi kasus. Data kualitatif studi kasus adalah jenis data deskriptif atau biasa disebut data non-

numerik yang mengacu pada angka, dalam hal ini data kualitatif ini lebih berfokus dan mengacu pada konteks, makna ataupun sebuah pengalaman dari subjek yang akan diteliti. Data ini memuat Analisa mendalam terkait dengan masalah atau topik yang akan diteliti. Sehingga dalam pengumpulan data kualitatif ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada subjek-subjek dengan memberikan pertanyaan

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan diwujudkan dalam bentuk data primer beserta data sekunder yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan jenis serta sumber data dari penelitian yang didapatkan secara riil atau langsung dari pihak yang berkaitan dengan topik yang diambil dalam penelitian ini. Penelusuran Data Primer dilakukan secara spesifik guna memberikan respon dari permasalahan. Data primer atau data langsung ini didapatkan dengan melalui tahap wawancara. Wawancara digunakan untuk pengkolektifan data primer dengan memanfaatkan persoalan yang baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau berbentuk lisan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan validasi dari jawaban yang sifatnya krusial dan signifikan. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis mengenai penolakan buruh Kota Semarang terhadap kebijakan

kewajiban pemotongan gaji 3% pada program tabungan perumahan rakyat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang terdapat secara tidak langsung dengan melalui media perantara, dengan artian data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi yang sudah ada. Dalam hal ini data sekunder didapatkan berupa barang bukti, dokumen catatan, peraturan pemerintah, laporan historia, jurnal ataupun artikel ilmiah yang telah disusun dan diarsipkan, surat intruksi aksi. Pada penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menggunakan media internet dan dokumen fisik seperti koran perdjoeangan FSPMI, buku dan laporan lain yang nantinya data ini akan digunakan untuk memperkuat dalam menganalisis penelitian ini.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam melakukan pengumpulan data seperti berikut :

1.10.1 Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam, dengan hal ini wawancara dilakukan secara lisan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang mendukung dalam penelitian sesuai dengan variabel teori yang digunakan, pertanyaan yang digunakan kepada

informan baik satu orang atau lebih dan hasil dari wawancara dapat berbentuk transkrip atau catatan, untuk memperoleh informasi yang relevan dan faktual dengan topik penelitian maka pendekatan emosional yang nyaman dilakukan agar informan lebih leluasa dan mudah dalam memberikan informasi untuk penelitian. Hal ini ditegaskan Stedward yang menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dengan informan, dan jawaban dari informan merupakan data mentah yang akan peneliti olah, dengan hal ini wawancara digunakan untuk mengaktifkan topik penelitian, selain itu wawancara digunakan untuk menambah data yang terkait topik dan literturnya masih minim. Menurut Lane wawancara merupakan percakapan dengan membangun suasana saling percaya antara peneliti dengan informan dengan menggunakan tahapan berawal dari diskusi yang bersifat umum menjadi bersifat mendalam atau spesifik.²² Pada tahap ini penulis telah melakukan wawancara kepada buruh yang terlibat terhadap penolakan ataupun tidak, seperti:

1. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah
 - a. Sumartono (Anggota aksi penolakan Tapera), wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2025 bertempat di Kantor FSPMI, Semarang
 - b. Panji (Anggota aksi penolakan Tapera) dilakukan pada tanggal 29 September 2025 bertempat di Kantor FSPMI,

²² Lisa Harrison. *Political Research*. London. Routledge (Taylor & Francis Group). Hlm. 90-93

Semarang

2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah.
 - a. Luqman Hakim (Ketua aksi penolakan Tapera) dilakukan pada tanggal 23 September 2025 bertempat di Tembalang Semarang
3. Federasi Serikat Pekerja Independen
 - a. Waluyo (Ketua FSPI) pihak yang tidak melakukan aksi penolakan kebijakan Tapera. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2026 bertempat di Lamper No 23
4. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara
 - a. Heru Budi Utoyo (Sekretaris Jenderal KSPN) pihak yang tidak melakukan aksi penolakan kebijakan Tapera.

1.10.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Di mana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang telah dibuat dan disusun oleh orang lain sebelumnya tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dokumentasi dari media, serta dari narasumber langsung seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).

1.11 Analisis dan Interpretasi Data

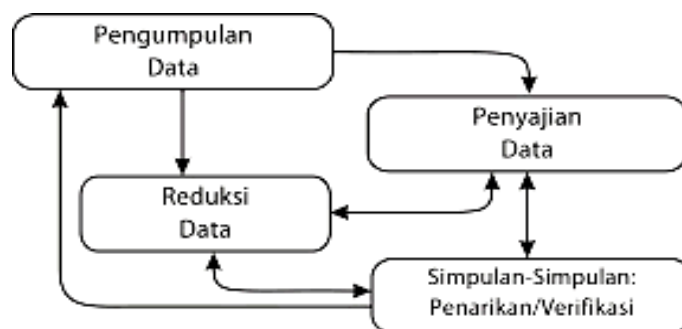
Analisis data adalah suatu proses pencarian, pengumpulan,

pengorganisasian dan mengkoordinir data secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak yang terlibat, dan data-data sebagainya dengan hasil luaran setelah diolah yakni informasi mudah dipahami serta substansi dapat tersampaikan secara optimal kepada orang lain.

Dalam Hasil dari analisis dan melewati tahap penafsiran untuk menjadi arti spesifik sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang membawa manfaat bagi penelitian. Bertahap ke langkah selanjutnya, tahap interpretasi data adalah tahap mengkoorelasikan hubungan antara berbagai variabel yang terdapat dalam penelitian dan untuk menjawab apakah hipotesis kerja diberikan akses atau tidak disetujui. Sedangkan pada metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif, interpretasi merupakan metode untuk menjelaskan fenomena penelitian secara lebih dalam berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan mendapatkan validasi.

Dalam menganalisis penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan Model Miles dan Huberman :

Gambar 1. 2 Metode Analisis Penelitian Kualitatif Miles dan Huberman



1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan pemilahan, berfokus pada penyederhanaan, dan transisi dari data kasar yang didapatkan dari catatan di lapangan, dalam hal ini mengurangi beberapa hal tapi mempertahankan substansi dari data yang telah dikumpulkan. Reduksi dilakukan secara kontinyu selama keberjalanan yang merujuk pada penelitian kualitatif. Dalam tahapan pengkolektifan data, dilakukan proses reduksi dengan tujuan utama untuk penyederhanaan yang berfokus untuk mempertahankan substansi dari data yang dilakukan selama laporan akhir tersusun secara komprehensif.

Reduksi data termasuk dalam bagian analisis, yang memiliki arti untuk mengerucutkan masalah dan menyeleksi bagian-bagian yang sifatnya esensial, sehingga konklusi akan didapatkan serta dapat melakukan proses verifikasi data. Penyederhanaan data kualitatif ini tidak diperlukan kuantisasi data, akan tetapi data dapat diubah menjadi variabel angka atau pemeringkatan guna mendapatkan detail dari hasil reduksi data.

2. Penyajian Data

Mengutip Miles dan Huberman terdapat batasan dalam presentasi atau penyajian informasi yang telah dikumpulkan dan disusun dengan adanya konklusi dan tindak lebih lanjut. Dengan tujuan untuk penyajian data lebih memiliki arah dan jalan utama guna menghasilkan analisis kualitatif yang memiliki validasi. Dalam penyajian tersebut dapat meliputi elemen grafik, bagan, ataupun elemen visualisasi data yang lain untuk representasi data

dengan rancangan informasi tersebut menjadi lebih teratur. Oleh karena itu analisis divisualisasikan untuk melihat yang telah atau sedang terjadi serta mendapatkan konklusi yang valid untuk melanjutkan analisis untuk menyajikan data yang lebih bermanfaat.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam penarikan Kesimpulan atau konklusi sebagaimana Miles dan Huberman hanya Sebagian dari suatu kegiatan dari sinkronisasi yang komprehensif. Kesimpulan harus divalidasi untuk verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi wajib dilakukan guna kebenaran data, hal ini dapat melalui sekecil kegiatan pada penelitian baik selama penulisan data atau informasi dan tinjauan dalam lapangan. Substansi harus dilakukan validasi untuk keselarasan dan originalitas data. Kesimpulan bukan hanya pada proses pengkolaktifan data akan tetapi perlunya verifikasi supaya pertanggungjawaban data terlaksana dengan baik.